

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan yang sedang dihadapi oleh komunitas internasional adalah proliferasi nuklir. Negara yang melakukan pengembangan tersebut adalah seperti Iran dan juga Korea Utara. Ketika Iran sedang membangun kebutuhan nuklir untuk bom, Korea Utara melakukan uji coba nuklir. Keberadaan isu nuklir ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran bagi dunia internasional, yang mana Negara-negara yang mempunyai kapasitas membangun nuklir akan mengembangkan nuklirnya dan terus akan meningkatkan kapasitasnya (Yew, 2011). Energi nuklir pertama kali digunakan sebagai sumber energi pada tahun 1896. Melihat kebutuhan dan meningkatnya kebutuhan akan energi maka Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Tiongkok berlomba untuk membangun fasilitas energi nuklir. Dengan energi yang dibangun maka manusia dapat mengekstrak energi dalam jumlah besar dibandingkan dengan energi lainnya (Herbst, 2007).

Melihat hal tersebut Korea Utara terdorong untuk ingin mengembangkan nuklirnya yang mana pada awalnya Korea Utara menjalin kerjasama dengan Uni Soviet. Pada tahun 1989 Korea Utara melaporkan telah memulai pengembangan Nodong pada tahun 1989. Sebagian besar literatur menegaskan bahwa Nodong tersebut dirancang dan dikembangkan oleh para insinyur Korea Utara dengan sedikit bantuan asing. Perkembangan pesat ini tanpa adanya uji coba yang signifikan selain penyebaran teknologi tersebut dan ekspor system teknologi dari Uni Soviet-Korea Utara. Pada tahun 1990 sampai tahun 1991 Korea Utara mengadakan 70-80 uji coba daya ledak tinggi di pusat penelitian Yongbyon (Wisconsin, 2016).

Perkembangan nuklir Korea Utara sesungguhnya diawali ketika Korea Utara bersama Uni Soviet menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Soviet pada 26 Maret dan 7 September yang mana perjanjian piagam tersebut juga

bersama Institut Riset Nuklir pada Februari 1956. Pada Dalam perjanjian tersebut korea Utara aktif mengirimkan ilmuwan dan teknisinya ke Uni Soviet untuk melakukan riset dan pelatihan tentang nuklir. Pada tahun 1959, Korea Utara dan Uni Soviet menandatangani perjanjian tentang penggunaan damai energi nuklir yang termasuk bantuan Soviet untuk mendirikan sebuah kompleks penelitian nuklir di Yongbyon (Sanger, n.d.). Pada perjanjian ini Uni Soviet setuju untuk melatih para pekerja Korea Utara di fasilitas nuklir di uni Soviet. Salah satu dari pesertanya adalah Cheo Hak-kun, yang merupakan Menteri dari Tenaga Atom Korea Utara yang dipercaya untuk dilatih di Dvina Nuclear Institute (DNI). (Cheng)

Korea Utara mulai mengembangkan penambangan uranium dalam skala yang cukup besar di lokasi dekat Suchon dan Pyongsan. Biji uranium ini akan di proses dan digiling dan diproses lebih lanjut sehingga menjadi bahan bakar reactor nuklir. Biasanya satu ton bijih uranium Korea Utara mengandung sekitar satu kilogram uranium yang diperkirakan Korea Utara dapat menghasilkan 50 ton uranium untuk bahan bakar reactor nuklir. Pada Juli 1977 Korea Utara menandatangani perjanjian keamanan trilateral dengan IAEA (*International Atomic Energy Academy*) dan USSR (*Uni Soviet Socialist Republics*) yang membawa penelitian reactor IRT-2000 di Yongbyon dibawah IAEA. Uni Soviet juga termasuk dalam perjanjian tersebut karena Uni Soviet yang menyuplai reaktor minyak mentah. Perjanjian ini menghasilkan Korea Utara dapat membawa IRT-2000 reaktor penelitian dan penanaman *critical assembly* di Yongbyon dibawah keamanan IAEA (Anthony H Cordesman, 2013). Pada awal 1980, Korea Utara meluncurkan program nasional terpadu untuk membangun fasilitas industri yang mampu memproduksi plutonium dalam skala besar untuk program senjata nuklir. Pada tahun ini Korea Utara sangat fokus terhadap praktik penggunaan energi nuklir dan penyelesaian system perkembangan senjata nuklir. Korea Utara juga mulai mengoperasikan fasilitas untuk pembuatan uranium dan pengkonneriannya. Korea Utara telah berhasil membangun reactor nuklir dengan kapasitas 200 MW di Yongbyon dan Taechon. Kemudian Korea Utara melakukan tes peledakan ledak tinggi tersebut.

Seiring dengan berjalannya perkembangan nuklir Korea Utara, Korea Utara melakukan beberapa kali uji coba nuklir yang membuat Negara-negara lain terancam. Pada Tahun 2003 Amerika Serikat mendeteksi Korea Utara sedang mengolah bahan bakar di penyimpanan sementara. Juru bicara kementerian luar negeri Korea Utara mengatakan bahwa Korea Utara sedang menyelesaikan pengolahan bahan bakar bekas yang menghasilkan plutonium yang dapat membuat empat sampai enam perangkat nuklir (Sanger, n.d.) Untuk mencegah situasi yang semakin memanas, maka dibuatlah usaha diplomatik. Dalam upaya ini Amerika Serikat sangat berperan dalam mendesak denuklirisasi di Korea Utara, yang mana menginginkan menghapus secara utuh kegiatan pengembangan ataupun pembuatan nuklir di Korea Utara.

Akhirnya pada tahun 2003 dibentuklah sebuah instrumen diplomasi yang bertujuan untuk meredam pengembangan nuklir Korea Utara. Instrumen ini disebut *Six Party Talks*, yang mana didalamnya beranggotakan oleh 6 negara *Six Party Talks* yang salah satunya adalah Tiongkok. *Six Party Talks* ini melakukan sampai sekitar tujuh kali pertemuan yang membahas tentang perkembangan nuklir di Korea Utara. Ada 6 negara yang masuk kedalam *Six Party Talks* salah satunya adalah Tiongkok yang mana turut dalam denuklirisasi nuklir Korea Utara. Tiongkok ditunjuk sebagai ketua dari perundingan dari *Six Party Talks*, karena Tiongkok dianggap kerabat dekat dengan Korea Utara sehingga mempunyai peluang besar dalam kesuksesan *Six Party Talks* ini untuk menghapus program pengembangan nuklir Korea Utara (Justisiawan, p. 5).

Hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara sudah berlangsung sejak lama. Yaitu pada masa perang Korea, Tiongkok membantu Korea dengan bantuan moral dan material kepada Kim il Sung yang menjadi pemimpin Korea pada saat itu. Isu nuklir pada saat ini menjadi salah satu isu yang dibicarakan oleh Tiongkok. Tiongkok membangun relasi dengan Amerika Serikat terkait pengembangan nuklir di Korea Utara. Sejarahnya, Amerika Serikat mempunyai hubungan yang terbatas, terutama pada tingkat pemerintahan dengan Korea Utara. Pada tahun 2010 pemerintahan Barrack Obama menyerukan untuk berdialog dengan Tiongkok mengenai stabilitas strategi terkait nuklir Korea Utara (Colby, 2013). Sebelumnya pada tahun 2006 dan 2009 Korea Utara melakukan dua kali

uji coba nuklir. Tindakan itu mendapatkan respon keras dari Amerika Serikat dengan memberikannya sanksi. Meskipun Korea Utara melakukan beberapa pelanggaran internasional terkait nuklir, Tiongkok tetap tidak melonggarkan hubungannya dengan Korea Utara, Bahkan Tiongkok meminta kepada Amerika Serikat agar meringankan sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Korea Utara (Anggia, 2016).

Pemberian sanksi kepada Korea Utara terkait pelanggaran tersebut membuat Tiongkok dilema, di satu sisi Tiongkok harus menggagal kepercayaan internasional untuk mewujudkan nuklir damai, tapi di sisi lain Tiongkok harus menjaga hubungan bilateralnya dengan Korea Utara dan menyelamatkan Korea Utara dari sanksi yang diberikan kepada Korea Utara (Anggia, 2016, p. 56). Tiongkok harus dapat mencapai dua tujuan yaitu denuklirisasi dan stabilitas di semenanjung Korea. Dalam beberapa agenda penting, Tiongkok menekan Pyongyang untuk berkomitmen terhadap denuklirisasi.

Tiongkok ditunjuk sebagai *Chairman* pada *Six Party Talks*. Pada perundingan putaran kedua *Six Party Talks* yang diadakan pada Februari 2004, Tiongkok membujuk Korea Utara agar mau menghentikan pengembangan nuklir di Korea Utara. Untuk memperoleh persetujuan Korea Utara kepada perundingan tersebut, Tiongkok menawarkan jumlah yang signifikan dalam bantuan ekonomi dan energi, total sekitar 50 juta dollar. Tetapi pada putaran fase dua, Tiongkok dipermalukan oleh Korea Utara dengan merubah arah kebijakan Korea Utara yang telah disepakati pada putaran kedua fase 1 (Kim, 2004, p. 154). Upaya, keuletan dan kesabaran Tiongkok untuk keberhasilan *Six Party Talks* tidak berhenti begitu saja, dapat dilihat dari diplomasi yang preventif dalam usahanya untuk menjaga *Six Party Talks* dari keruntuhan atau kehancuran. Tiongkok memanggil kembali Jepang, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara dan Amerika Serikat untuk mengatur kembali jadwal untuk pertemuan dalam membahas yang menjadi agenda inti dari perundingan (Kim, 2004, p. 155).

Six Party Talks tidak berlangsung lama untuk menggandeng Korea Utara, pada tahun 2009 Korea Utara menyatakan keluar dari *Six Party Talks*. Berselang empat tahun setelah Korea Utara keluar dari *Six Party Talks*, Korea kembali

melakukan uji coba nuklirnya pada bulan february 2013. Hal tersebut mendapat respon keras dari Tiongkok. Menteri luar negeri Tiongkok saat itu, Jiechi memanggil duta besar Korea Utara ke Tiongkok. Dalam laporannya menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok secara aktif membujuk pemerintah Korea Utara yaitu Kim Jong Un agar tidak bergerak maju untuk mengembangkan nuklirnya. Tiongkok mendukung sanksi dan resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara. Pada bulan Maret 2013, kurang dari sebulan setelah uji coba nuklir oleh Korea Utara, dewan keamanan PBB mengesahkan resolusi 2094, yang berisi keprihatinan tentang uji coba nuklir tersebut dan mengutuknya. Sanksi tersebut diterapkan kepada sanksi finansial kepada Korea Utara dan pembatasan impor (Tiezzi, 2016).

Presiden Xi Jinping yang menjabat menjadi pemimpin Tiongkok pada saat itu bertemu dengan utusan Korea Utara, Choe Ryong-Hae pada Mei 2013, Tiongkok menyerukan tentang tujuan denuklirisasi untuk stabilitas kawasan (Ru, 2016, p. 2). Ketika presiden Xi bertemu dengan Choe, Xi sangat menekankan kepada denuklirisasi di Korea Utara sebanyak tiga kali yang mengartikan bahwa Xi benar benar bertindak tegas untuk bersepakat dengan Korea Utara terkait krisis nuklir Korea Utara daripada pendahulu sebelumnya (Yu Tiejun, 2016, p. 21). Pada Juni 2013, Amerika-Tiongkok Summit yang diadakan di California, presiden Tiongkok Xi Jinping menyebutkan niatnya untuk kerjasama dengan Amerika Serikat yang mana presiden Obama menyerukan juga bahwa isu nuklir Korea utara adalah sebuah isu yang Amerika Serikat dan Tiongkok harus bekerjasama didalamnya (Kurata, 2016, p. 3).

Sikap Tiongkok terhadap Korea Utara terbawa kembali kepada kebiasaan pendahulu sebelumnya. Pada beberapa isu Xi memberika ucapan selamat kepada Kim Jong Un atas hari jadi dari Workers Party of Korea (WPK), Xi mengirimkan Liu dari *Tiongkok Communist Party* (TCP) untuk berkunjung ke Korea Utara untuk merayakan hari jadi tersebut. Kebijakan Tiongkok terhadap Korea Utara juga berimplikasi kepada kebijakan luar negeri Tiongkok kepada krisis nuklir Korea Utara. Menetri Luar negeri Tiongkok Wang Yi mengkritik tentang sanksi dan resolusi yang dikeluarkan dewan keamanan PBB tentang kebiasaan Korea Utara, Menurut Yi pemberian sanksi terhadap kasus nuklir tersebut bukalan tujuan

akhir dan tindakan yang tepat untuk mencapai akhir dari permasalahan tetapi langkah yang harus diambil adalah membawa kembali Korea Utara kepada perundingan berdasarkan negosiasi (Yu Tiejun, 2016, p. 21).

Pada bulan Desember 2015, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengklaim bahwa Korea Utara mempunyai kapasitas untuk meluncurkan bom hidrogen, sebuah alat yang lebih kuat daripada bom atom konvensional yang digunakan pada uji coba sebelumnya (Cassella, 2016). Setelah klaim tersebut Korea Utara melancarkan uji coba kembali pada Januari 2016. Tiongkok pun merespon untuk menyelesaikan permasalahan nuklir ini, Xi Jinping lebih memilih untuk menyelesaikan tujuannya tersebut melalui *Six Party Talks* yang sempat vakum., Menteri Luar negeri Tiongkok mengatakan bahwa semua pihak yang terkait harus kembali kepada jalurnya untuk mendenuklirisasi Korea Utara melalui instrument diplomasi yaitu *Six Party Talks* agar pengembangan nuklir Korea Utara dapat dirundingkan dan tujuan dari *Six Party Talks* dapat tercapai demi terselesaikannya pengembangan nuklir di Korea Utara. (USCC, 2016, p. 451).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pengembangan Nuklir Korea Utara yang mana dimulai dari tahun 1950 banyak aktor-aktor yang terlibat untuk mredam pengembangan Nuklir tersebut. Aktor-aktor tersebut berusaha berdiplomasi dengan Korea Utara agar Korea Utara menghentikan pengembangan nuklirnya, salah satunya adalah Tiongkok. Korea Utara sudah beberapa kali melakukan Perundingan dengan negara-negara lain terkait pengembangan Nuklirnya, seperti bergabungnya Korea Utara dengan *Six Party Talk* pada tahun 2003 bersama ke-5 negara lainnya. Tiongkok yang dianggap kerabat erat Korea Utara ditunjuk sebagai ketua perundingan dengan harapan dapat berperan dalam keputusan pengembangan nuklir oleh Korea Utara. Meskipun beberapa diplomasi dilakukan seperti *Six Party Talks*, meskipun diplomasi ini mengalami kebuntuan dalam perjalanannya, diplomasi denuklirisasi Korea Utara terus diupayakan, salah satunya oleh Tiongkok yang memang diharapkan dapat berpengaruh besar dalam pengembangan nuklir Korea Utara sampai saat ini. Dari pernyataan berikut timbulah pertanyaan , “ **Bagaimana**

Diplomasi Tiongkok terhadap Korea Utara dalam denuklirisasi Korea Utara pada era Xi Jinping (2013-2016) ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap pengembangan nuklir di Korea Utara.
2. Untuk mengetahui kondisi pengembangan nuklir Korea Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat praktis:
Memberikan pemahaman tentang diplomasi Tiongkok dengan Korea Utara terkait pengembangan nuklir di Korea Utara pada era presiden Xi Jinping periode 2013-2016
2. Manfaat akademis:
Memberikan informasi yang lebih jelas di dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam membahas permasalahan perkembangan nuklir Korea Utara dan peran serta diplomasi Tiongkok yang mana turut andil dalam denuklirisasi Korea Utara

penulis menjadikan beberapa sumber atau jurnal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian pertama yaitu sebuah penelitian oleh Muhammad Nabil yang berjudul "*Diplomasi Multilateral Six Party Talks Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-2009*", Penelitian ini dibuat oleh Muhammad nabil yang memaparkan tentang Nuklir Korea Utara serta upaya *Six Party Talks* untuk menghentikan program pengembangan nuklir korea Utara. Dalam penelitian ini dipaparkan beberapa pencapaian yang dilakukan oleh *Six Party Talks* yang mana didalamnya termasuk 6 negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Korea utara, dan Tiongkok. Dalam pemaparannya tujuan utama *Six Party Talks* sudah tentu adalah mewujudkan denuklirisasi Korea Utara, *Six Party Talks* harus menjalani serangkaian proses negosiasi yang panjang demi sebuah pencapaian yang maksimal.

Berhasilnya instrumen ini ketika menginjak usianya yang ke dua tahun yaitu pada tahun 2005 yang mana semua anggota menyepakati *Joint Statement* yg diimplementasikan ke dalam Beijing Agreement pada tahun 2007. Tercapainya *Joint Statement* ini menggambarkan bahwa *Six Party Talks* mengalami pengembangan. Isi dari *Joint Statement* ini adalah komitmen Korea Utara untuk meninggalkan semua senjata nuklir yang telah dikembangkannya. Korea Utara juga akan menerima berbagai bentuk pemeriksaan dari IAEA (*Internatioanal Atomic Energi Agency*). Didalam penelitian ini disajikan atau dipaparkan beberapa tabel keberhasilan *Six Party Talks* termasuk Tiongkok dalam denuklirisasi nuklir Korea utara.

Lalu ditemukan pada penelitian ini adalah implementasi dari perundingan 6 negara terhadap nuklir Korea Utara. Setelah disetujuinya *Joint Statement*, Korea Utara tidak begitu saja bergabung tanpa timbal balik. Korea utara meminta kepada anggota *Six Party Talks* untuk membantu Korea Utara secara ekonomi maupun sumber daya. Keenam pihak sepakat untuk menignkatkan kerjasama ekonomi

dibidang energi, perdagangan dan investasi sebagai upaya membujuk Korea Utara agar mau menghentikan pengembangan nuklirnya. Termasuk salah satunya Tiongkok yang juga menyatakan keinginannya menyediakan bantuan energi untuk Korea Utara.

Perbedaan dengan penelitian yang kali ini penulis lakukan adalah belum dijelaskannya peran khusus dari Tiongkok dalam denuklirisasi nuklir di Korea utara pasca *Six Party Talks* maupun pada sebelumnya.

Jurnal penelitian yang kedua adalah sebuah jurnal internasional yaitu oleh Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri yang berjudul "***Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional***".

Pada jurnal ini memaparkan tentang bagaimana Korea utara membangun atau mengembangkannya nuklirnya untuk berdiplomasi. Pengembangan senjata nuklir Korea Utara membuat perekonomian Negara-negara lain terhambat. Karena Negara yang ingin berinvestasi di kawasan tersebut harus berfikir kembali akan dampaknya jika mereka berinvestasi di kawasan tersebut. Dalam konteks politik internasional, kepemilikan senjata nuklir oleh suatu Negara dapat dijadikan suatu perubahan. Terutama rawan konflik. Daya tawar yang dimunculkan oleh nuklir sangat tinggi tetapi sama tingginya dengan ketegangan yang muncul di berbagai belahan dunia termasuk di kawasan Asia Timur.

Ketegangan di Asia Timur saat ini hanyalah sebuah episode dari perjalanan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya sejak tahun 1970. Pada 5 April 2009 lalu, Korea Utara akhirnya meluncurkan roket dari Musudan-ri, sebuah fasilitas militer di pesisir timur Korea Utara. Klaim Korea Utara bahwa peluncuran roket ini adalah misi penempatan satelit komunikasinya dianggap sebagai tipuan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Keduanya meyakini bahwa di balik alasan resmi tersebut Korea Utara berusaha menguji hasil pengembangan daya jangkau peluru kendalinya yang diperkirakan memiliki jangkauan hingga wilayah Alaska, sebagai bagian dari program senjata nuklir Korea Utara. Beberapa kali tindakan uji coba nuklir Korea Utara dikecam oleh dunia internasional.

Korea Utara juga pernah masuk kedalam badan-badan yang membicarakan permasalahan nuklir, seperti NPT dan *Six Party Talks*, tetapi Korea Utara keluar karena mersa dapat tekanan dari berbagai pihak. Sampai saat ini Korea Utara masi mempertahankan pengembangan nuklirnya, Menurut penelitian ini ada beberapa alasan kenapa Korea Utara masih mempertahankan pengembangan nuklirnya. Alasan utamanya adalah untuk melindungi keamanan negaranya terutama dari agresi militer Amerika Serikat yang dipandang sebagai ancaman. Jadi tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Korea Utara mengejar strategi nuklir sebagai agenda utama nasionalnya. Korea Utara menjadikan pengembangan nuklir ini sebagai instrumrn diplomasi dengan Negara-negara lain demi meraih kepentingan nasionalnya. Andi Purwono dan Ahmad saifuddin Zuhri mengatakan bahwa ada empat faktor atau alasan mengapa Korea Utara menjadikan nuklir sebagai instrument diplomasi, yaitu alasan *regime survive*, Alasan ekonomi, dan alasan keamanan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan penulis buat adalah pada penelitian ini difokuskan kepada kacamata Korea Utara, mengapa Korea Utara ingin mengembangkan nuklirnya disamping kecaman internasional terus dilayangkan. Tidak ada dipaparkannya secara khusus bagaimana respon Korea Utara terhadap apa yg Tiongkok lakukan terhadap Korea Utara ataupun sebaliknya.

Tinjauan yang ketiga adalah sebuah penelitian yang ditulis oleh Alfina Farmawati Wicahyani yang berjudul "***Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara terhadap kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur***". Pada penelitian ini memaparkan respon Tiongkok terhadap pengembangan nuklir Korea Utara. Kekhawatiran Tiongkok terhadap pengembangan nukir Korea Utara adalah efek domino yang dapat membenarkan Jepang untuk mengembangkan kapabilitas nuklirnya. Hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara mulai merenggang dan penuh ketegangan . Ada beberapa pendekatan Tiongkok terkait pengambangan nuklir Korea Utara, pertama Tiongkok berusaha keras untuk menghentikan program nuklir dan rudal jarak jauh yang dikembangkan oleh Korea Utara karena

program tersebut telah memberikan ancaman terhadap kepentingan Tiongkok. Kedua, Tiongkok mendukung Korea Utara demi kebaikan hubungan dengan Korea Utara. Ancaman nuklir Korea Utara ini juga membuat Tiongkok memperluas gedung senjata nuklir yang dimilikinya.

Tiongkok berusaha meningkatkan teknologi persenjataan serta melakukan akselerasi program nuklirnya guna merespon penempatan BMD (*Balistic Missile Defence*) oleh Amerika Serikat ataupun uji coba nuklir Korea Utara. Namun pengembangan yang dilakukan oleh Negara tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kawasan disekitarnya. Peran Tiongkok dalam denuklirisasi Korea utara terlihat dari instrument diplomasi yaitu *Six Party Talks*. Pada krisis nuklir semenanjung Korea yang pertama, Tiongkok dapat dikatakan hanya sebagai pemerhati, namun ketika krisis nuklir kedua terjadi pada tahun 2002, Tiongkok mulai berperan aktif dalam mencari solusi bagi Korea Utara. Tahun 2003, peran Tiongkok dimulai dengan menjadi tuan rumah yang memfasilitasi pembicaraan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Tiongkok juga menjadi fasilitator dalam mengatur beberapa putaran *Six Party Talks* selanjutnya.

Perbedaan dari penelitian ini dari penelitian yang penulis buat adalah peranan Tiongkok dalam *Six Party Talks* sebagai mediator ataupun tuan rumah untuk perundingan *Six Party Talks*. Tidak ada secara khusus dijelaskan tentang diplomasi ataupun respon Tiongkok terhadap pengembangan nuklir Korea Utara era Xi Jinping.

Pada penelitian yang akan penulis buat sedikit ada persamaan antara tinjauan pustaka yang penulis tulis sebelumnya. Perbedaan dari tinjauan pustaka dan penelitian ini adalah tidak adanya pembahasan mengenai peran Tiongkok dalam menanggulangi perkembangan nuklir di Korea Utara secara terperinci.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 *Denuclearization*

Denuklirisasi dalam pengertian bahasa adalah penghapusan senjata nuklir di suatu Negara. Pandangan umum terkait Negara diperlukan denuklirisasi adalah Negara melakukan denuklirisasi untuk menanggapi serta mengurangi ancaman yang dirasakan. Kenneths Waltz's pada *realist school of thoughts* mendominasi debat terkait poliferasi atau penyebaran nuklir. Dalam teorinya, Negara mengembangkan nuklir untuk memiliki *absolute power* dengan kekuatan konvensional. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk bertahan pada dunia yang bersifat anarkis serta melakukan deterrent kepada Negara-negara lain. Negara bias juga mengejar kepentingan lain, yaitu peningkatan *power* (Hughes, *Denuclearization: A Model Based Approach*, 2013, p. 74).

Denuklirisasi dapat dikatakan sebagai sebuah pelucutan senjata secara bertahap dari senjata nuklir dari Negara-negara yang mengembangkannya. Denuklirisasi merupakan usaha secara sadar untuk meninggalkan senjata pemusnah masal atau yang sering disebut Weapon Mass Destruction (WMD) oleh Negara yang mengembangkannya. Dalam kata lain adalah sebuah pencegahan dari Negara-negara yang tidak mengembangkannya. Denuklirisasi ini pada akhirnya memiliki peran dalam berkontribusi pada pengembangan kepentingan internasional dan sebuah system keamanan yang kooperatif (Sikorska, 2009, p. 24). Dengan adanya suatu denuklirisasi ini, kekuatan senjata nuklir yang dikembangkan oleh suatu negara sebagai strategi deterrent akan mulai dihentikan. Negara pada tahapan selanjutnya akan bergantung kepada senjata konvensional untuk keamanan negaranya dari pada nuklir yang termasuk kedalam WMD. Etel Solingen berpendapat atas alasan domestic terhadap denuklirisasi, yaitu (Hughes, 2013. p. 75):

1. denuklirisasi bergantung pada pengaruh penting dari institusi domestik yang didalamnya adalah Negara.
2. Konteks kebiasaan atau sikap alami suatu kawasan untuk membangun koalisi Negara atau badan dalam rangka denuklirisasi.

Solingen mengklasifikasikan negara juga sebagai praktik dari kebijakan internasional, yang diartikan kepada konteks regional maupun global untuk mengejar denuklirisasi. Strategi utama dari sebuah koalisi adalah penting untuk dipahami, bukan hanya dalam konteks internasional tetapi juga didalam regional dan kebijakan domestic. Hal ini baik untuk pertimbangan faktor domestik dan faktor regional sebagai alasan kenapa Negara itu denuklirisasi.

1.6.2 Diplomasi

Diplomasi merupakan Instrumen dalam menjalankan suatu kebijakan luar negeri yaitu dapat berupa dengan melakukan suatu diplomasi. Menurut *Ellis Briggs*, diplomasi merupakan sebuah kegiatan urusan pemerintahan dengan cara mengirim seseorang atau utusan untuk mewakili pemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan (Briggs, 1968). Kebijakan luar negeri mempengaruhi kegiatan diplomasi bagi negara-negara yang melakukannya. Maka diplomasi yang dilakukan negara-negara harus selalu sejalan dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Kegiatan diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara. Dalam mempelajari diplomasi pada umumnya harus ditinjau hubungan antar negara dan politik luar negerinya, sehingga hubungan diplomasi dan politik luar negeri suatu negara mempunyai interelasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Misi atau tujuan diplomasi adalah melakukan fungsi sesuai dengan tujuannya, berkontribusi untuk saling mengerti dan menjalin hubungan yang erat antara dua Negara untuk mencapai tujuan masing-masing Negara tersebut (Iucu, p. 130).

Saat ini penggunaan diplomasi dan penegetian istilah diplomasi makin meluas dan bahkan mengejala diberbagai kalangan sehinggann penggunaan kata diplomasi ini seakan-akan selalu benar. Dari beberapa pengertian yang variatif tersebut, Syahmin menggambarkan variasi diplomasi adalah disama artikan dengan perundingan, misalnya ditemui dalam kalimat “masalah-masalah di kawasan bahkan hanya bisa diselesaikan dengan diplomasi”. Meskipun istilah

diplomasi makin lama makin bias, namun jika dicermati dari berbagai tulisan dapat diambil simpulan bahwa pengertian diplomasi merupakan sarana yang bisa dipakai oleh suatu Negara untuk melaksanakan hubungan internasional. Secara khusus, pengertian diplomasi mengarah pada berbagai teknik dan prosedur yang lazim digunakan oleh Negara dalam rangka melaksanakan hubungan dengan Negara lain dan/atau subjek hukum internasional bukan Negara (Widodo P. , 2009).

Analisis diplomasi sebagai *dependent variable* juga terfokus kepada sejauh mana diplomasi menyesuaikan diri dengan suatu permasalahan. Gagasan Nicolson tentang diplomasi sedikit menggabungkan potensi diplomat dan pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan militer, politik dan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi inisiatif diplomasi. Hal yang selanjutnya adalah antara jenis negosiasi yang di negosiasikan dan yang tidak di negosiasikan. Diplomasi dinegosiasikan saat kepentingan Negara tidak dapat didamaikan sepenuhnya, dan tawar menawar diperlukan untuk mengungkapkan suatu kesepakatan, sebagai contoh Hedley Bull mencatat bahwa masalah diplomasi adalah bahwa Negara memiliki perbedaan kepentingan dan kepentingan umum pertama-tama harus diidentifikasi dengan proses tawar menawar sebelum pertanyaan yang lain muncul ke permukaan. Tawar menawar yang tidak dinegosiasikan adalah Kritis untuk norma-norma perilaku internasional. Konvergensi dirangsang oleh bergeser kepentingan nasional atau oleh peluang baru untuk mengenali perubahan tersebut. (Steiner, 2012, p. 495).

Dalam diplomasi ada beberapa fungsi yang mengikutinya. Fungsi tersebut adalah (Iucu, p. 131):

1. Mengirim utusan Negara kepada Negara penerima
2. Berunding dengan Negara penerima
3. Mempromosikan hubungan yang baik antara Negara dengan Negara penerima

Menurut Nicholas, keberhasilan politik atau kebijakan luar negeri tidak tergantung kepada tujuan dan abstrak melainkan kepada pelaksanaan diplomasi yang nyata melalui berbagai cara yaitu dengan menyebarluaskan kebijakan yang diambil, menjelaskannya dan merundingkan persetujuan yang menjamin keamanan negara, baik itu perang ataupun damai (Syahmin, 2009).

Lord Strang mengartikan diplomasi adalah sebagai pelaksanaan hubungan antar pemerintah dari berbagai Negara melalui wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing Negara. Menurut River pengertian diplomasi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (Widodo, 2009):

1. Diplomasi sebagai ilmu dan seni dalam mewakili Negara.
2. Diplomasi sebagai sebuah upaya mewakili Negara termasuk kementerian luar negeri dan agen politik
3. Diplomasi sebagai karir atau profesi seorang diplomat

Jadi diplomasi adalah suatu seni bernegosiasi antar Negara yang mana mengirimkan utusan negaranya untuk berunding dengan Negara lain untuk mencapai kepentingan nasional Negara ataupun menjalin hubungan yang damai dengan Negara lain. Korelasi antara konsep dengan penelitian adalah dijelaskan bahwa Tiongkok beberapa kali bertemu dengan utusan Korea Utara untuk melakukan perundingan demi mencapai kesepakatan yaitu non-proliferasi Korea Utara. Selain itu Tiongkok juga melakukan pendekatan kepada Korea Utara guna menjaga hubungan baik yang dibentuk semenjak lama di situasi konflik yang diakibatkan oleh nuklir Korea Utara.

Korelasi antara teori ini dengan penulisan adalah kita dapat melihat bagaimana diplomasi Tiongkok dengan cara mengutus utusannya kepada Korea Utara demi menjalankan kepentingannya di semenanjung ataupun demi mengajak Korea Utara agar dapat menghentikan perkembangan nuklirnya.

1.7 Alur Pemikiran



1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yang meliputi data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar dan juga internet. Data tersebut akan penulis gunakan dalam menyelesaikan penulisan ini dan juga penulis akan menganalisa menggunakan teori yang telah ditetapkan dalam penulisan ilmiah ini.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitaian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social masalah manusia. Setidaknya terdapat lima tahapan sebagai patokan dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Mengangkat permasalahan

Permasalahan yang biasanya diangkat dalam penelitian ini adalah bersifat unik, memiliki daya Tarik tertentu, spesifik dan terkadang sangat bersifat individual.

2. Memunculkan pertanyaan penelitian.

Pertanyaan merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Adalah sebaai spirit yang fungsinya sama penting seperti hipotesis dalam penelitian kualitatif.

3. Mengumpulkan data yang relevan

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa kumpulan kata, kalimat, pernyataan atau uraian yang mendalam.

4. Melakukan analisis data.

Analisis data merupakan langkah berikutnya setelah data relevan diperoleh.

5. Menjawab pertanyaan penelitian.

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian kualitatif. Dalam menjawab pertanyaan, peneliti dapat menggunakan gaya menulis yang lebih bebas, seperti narasi. Sehingga dalam menjawab pertanyaan penelitian dapat lebih menarik untuk dibaca.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen-dokumen lembaga internasional serta melakukan wawancara kepada para pakar dan ahli.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (library research) dengan bahan pustaka berupa buku, jurnal,

bulletin, surat kabar, serta media internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan relevan

1.8.3 Teknik Analisa Data

Data yang didapat kemudian dikelola untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian.

1.9 Asumsi

1. Tiongkok pada era Xi Jinping lebih menekankan kepada diplomasi ekonomi kepada Korea Utara untuk meredam pengembangan nuklir Korea Utara
2. Xi Jinping melakukan kerjasama dengan Negara lain untuk membujuk Korea Utara agar tidak melakukan uji coba nuklir
3. Xi Jinping lebih bertindak keras terhadap Korea Utara sehingga hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara meregang.

1.10 Sistematika penulisan

Dibawah ini sistematika penulisan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada. Penulisan dibagi menjadi empat bab.

Bab I membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, konsep, asumsi, hipotes, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang sejarah perkembangan nuklir Korea Utara dan hubungan Korea Utara dengan Tiongkok

Bab III membahas tentang upaya Xi Jinping dalam denuklirisasi di Korea Utara pada era presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping (2013 – 2016).

Bab IV berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah penulis bahas dalam tiga bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih terfokus.

